



► PESTA DEMOKRASI

## KPU Tak Bisa Ganti Maskot Pilkada

TEGALREJO—KPU Kota Jogja menerima kritikan soal maskot Pilkada Kota Jogja yang dinilai bias gender. Meski demikian, KPU memastikan proses pembuatan maskot sudah melibatkan masyarakat, termasuk akademisi dan perempuan.

Ketua KPU Kota Jogja, Noor Harsya Aryosamodro, menjelaskan maskot tersebut dibuat dengan mekanisme sayembara pada Mei 2024. Tiga juri terlibat dalam penilaian meliputi Kepala Dinas Kebudayaan Kota Jogja, Yetti Martanti; Akademisi Arsitektur UII, Revianto Budi Santoso; dan konduktor sekaligus pendidik di Taman Siswa, Ki Priyo Dwi Harso.

"Kami terbuka menginformasikan itu [sayembara maskot] di *website* maupun media sosial KPU Kota Jogja. Kami memberi pengumuman, tahapan dan keputusan juri," ujarnya, Minggu (10/11).

Maskot yang terpilih berdasarkan penilaian dewan juri yakni berbentuk buah kepel yang merupakan buah khas DIY, dengan mahkota buah yang menggerombol, diberi wajah, tangan dan kaki serta memakai busana jarik, lurik dan slop gagrak Ngayogyakarta Hadiningrat. Seluruh



**Pertemuan jajaran** KPU Kota Jogja dengan Forum Perempuan Peduli Pilkada Kota Jogja 2024, Minggu (10/11).

unsur dalam maskot tersebut dari perspektif KPU Kota Jogja tidak ada yang menyimbolkan laki-laki atau perempuan. Namun, maskot tersebut dinilai bias gender karena tubuhnya terlihat maskulin, yakni kaki maskot yang terlalu melebar. Ia mengaku setelah ada kritik pada

Rabu (6/11), KPU Kota Jogja belum membuat rapat pleno menyikapi hal ini. "Kami menerima masukan," katanya.

Meski demikian, Noor mengaku untuk mengganti maskot bukan perkara mudah. Hal ini dikarenakan anggaran pembuatan sudah

dikeluarkan.

Sementara untuk menghapus maskot tanpa menggantinya, hal itu tidak bisa karena setiap KPU di daerah diwajibkan memiliki maskot dan *jingle*.

Anggota Forum Perempuan Peduli Pilkada Kota Jogja 2024, Renny A. Frahesty, menuturkan bias gender itu bukan penilaian subjektifnya, melainkan 65 orang yang mengatakan maskot tersebut lebih terlihat seperti laki-laki. "Terima kasih KPU menerima masukan itu sebagai bias gender. Perspektif Geds [kesetaraan gender, disabilitas dan inklusi sosial] ini harus masuk di masyarakat. Kami juga sulit. Prosesnya [pembuatan maskot] menurut kami tidak transparan. Unsur juri hanya dari satu bidang, yakni budaya. Ini melupakan nilai yang lebih besar, yakni pendidikan," katanya.

Ia berharap KPU Kota Jogja bisa menarik maskot tersebut dan menggantinya dengan yang lebih netral. "Hal ini penting karena proses pemilu atau pilkada melibatkan semua kalangan, bukan hanya laki-laki saja," katanya. *(Lugas Subarkah)*

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1.	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 23 November 2024  
Kepala

**Ig. Trihastono, S.Sos. MM**  
NIP. 19690723 199603 1 005